



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**



**SKRIPSI**

**PENGARUH EFEKTIVITAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN  
TERHADAP PENDETEKSIAN INDIKASI *FRAUD* PADA  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar)**

Oleh:

**Andhika Pratama Tirta Wijaya  
No. BP : 1510539004**

*Dosen Pembimbing : Dra. Husna Roza, M.Com (Hons), Ak.*

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas  
Untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PADANG**

**2017**



No. Alumni  
Universitas:

**ANDHIKA PRATAMA  
TIRTA WIJAYA**

No. Alumni  
Fakultas: 2882

a) Tempat dan Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 Juni 1990 b) Nama Orang Tua : Suwandi dan Sri Sulastri, S.Pd c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : S1 Akuntansi e) No. BP : 1510539004 f) Tanggal Lulus : 2 Mei 2017 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,68 i) Lama Studi : 2 tahun j) Alamat Orang Tua : Silamat, RT.01 RW.12, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 57772

**PENGARUH EFEKTIVITAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERHADAP  
PENDETEKSIAN INDIKASI *FRAUD* PADA LAPORAN KEUANGAN**

**PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar)**

*Skripsi oleh : Andhika Pratama Tirta Wijaya*

*Pembimbing : Dra. Husna Roza, M.Com (Hons), Ak.*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of rationalization factor from the Fraud Triangle Theory to detect the occurrence of fraud in local government financial statements. The measuring of rationalization factor uses the control environment elements, namely the integrity and ethics values maintenance, organization structure, and human resources policies. Manipulation, falsification or alteration of accounting records and supporting documents from the financial statements arranged are used as proxies that indicate fraud in the financial statements. The population of this study is 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) within the scope of Karanganyar District Government. The sample in this research is chosen by using purposive sampling method with criteria: the organization role to run the government and expenditure budget allocation for SKPDs which will be samples for more than 50% from APBD. From those population, 10 SKPDs have been chosen as samples with expenditure budget allocation is as much as 63,92% from APBD. The research data are collected by distributing 200 questionnaires to the selected SKPD of which respondents are structural officials who understand about SPIP. From those numbers, 164 questionnaires have been decided valid to be enclosed into this research. This research uses multiple linear regressions to test the hypothesis. The results show that the integrity and ethics values maintenance as well as the organization structure affect significantly toward the effort to detect indications of fraud in the government financial statement, while the human resources policy has no significant effect on efforts to detect indications of fraud in the financial statements of local government.*

**Keywords:** *rationalization, control environment, integrity and ethical values, organizational structure, human resources policies, fraudulent in local government financial statement.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor rasionalisasi dari *Fraud Triangle Theory* dalam mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran faktor rasionalisasi menggunakan sub unsur pembentuk lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika, struktur organisasi, dan kebijakan sumber daya manusia. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi dan dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun digunakan sebagai proksi yang mengindikasikan adanya kecurangan laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu peran instansi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan alokasi anggaran belanja untuk SKPD yang akan menjadi sampel berjumlah >50% dari APBD. Dari jumlah populasi tersebut terpilih 10 SKPD sebagai sampel dengan total alokasi anggaran belanja 63,92% dari APBD. Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan 200 kuesioner kepada SKPD yang terpilih dengan responden pejabat struktural yang memahami tentang SPIP. Dari jumlah tersebut 164 kuesioner dinyatakan valid untuk disertakan dalam analisis data. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan integritas dan nilai etika serta struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian indikasi *fraud* pada laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kebijakan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian indikasi *fraud* pada laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** rasionalisasi, lingkungan pengendalian, penegakan integritas dan nilai etika, struktur organisasi, kebijakan sumber daya manusia, kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

